



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASRANI
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN
3. NHK : 481149

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **458.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 869 m2/131 m2 di KAB / KOTA HULU SUNGAI SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 483 m2 di KAB / KOTA HULU SUNGAI SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah Seluas 6.791 m2 di KAB / KOTA HULU SUNGAI SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 537 m2 di KAB / KOTA HULU SUNGAI SELATAN, WARISAN Rp. 4.000.000
6. Tanah Seluas 447 m2 di KAB / KOTA HULU SUNGAI SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **113.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR/SCOOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **250.250.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	109.237.530
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	930.487.530
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	930.487.530

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.